

Eks Kepala Bea dan Cukai DIY Segera Disidang Terkait Gratifikasi Rp10 Miliar

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, menerima gratifikasi hingga Rp 10 miliar.

Eko Darmanto ditetapkan sebagai tersangka berawal dari pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh Kedepuhan Pencegahan dan Monitoring KPK.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, nilai gratifikasi itu merupakan hasil akhir penyidikan yang telah diserahkan kepada tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

"Penerimaan gratifikasi dari tersangka ED (Eko Darmanto) selaku pejabat di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu RI diperkirakan mencapai Rp 10 miliar," ujar Ali dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (16/4).

Tim Jaksa KPK menilai, semua unsur dalam pasal

dalam perkara gratifikasi Eko Darmanto sudah lengkap. Saat ini, berkas perkara dan kewenangan atas penahanan Eko sudah berada di tangan Jaksa KPK.

Jaksa KPK menahan Eko selama 20 hari ke depan sampai 24 April di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

"Dakwaan dan berkas perkara segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor dalam waktu 14 hari kerja," ujar Ali.

Eko Darmanto menjadi sorotan publik ketika netizen ramai-ramai membagikan gaya hidup mewah sejumlah pejabat negara. Dalam foto yang beredar, Eko mengunggah foto sejumlah mobil antik. KPK pun melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap LHKPN Eko dan menemukan penerimaan uang. Lembaga antirasuah kemudian menetapkan Eko sebagai tersangka dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). ● **mei**

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



KPU SERAHKAN KESIMPULAN SIDANG PHPU

Komisioner KPU Mochammad Afifuddin (kedua kanan) didampingi rekannya Idham Holik (kanan) beserta kuasa hukum memberikan keterangan pers usai menyerahkan kesimpulan dari sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 ke MK, Jakarta, Selasa (16/4). Menurut Mochammad Afifuddin, kesimpulan yang diserahkan itu menegaskan bahwa seluruh dalil-dalil pemohon dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan tidak terbukti.

Kejaksanaan Agung Bikin Terobosan dalam Penanganan Kasus Korupsi

Kejagung memperhitungkan kerugian ekonomi saat ini dan di masa depan, seperti kerusakan lingkungan atau infrastruktur, dalam kasus korupsi.

JAKARTA (IM) - Kejaksanaan Agung (Kejagung) membuat terobosan baru dalam mengear pengembalian kerugian negara yang dikorupsi. Terobosan baru itu merupakan langkah yang sangat berarti karena masih banyak lembaga penegak hukum lain yang belum menerapkan kerugian

perekonomian negara dalam kasus korupsi.

Demikian diungkapkan Pakar pidana Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (16/4).

Menurut Hibnu, langkah ini merupakan terobosan

baru yang patut diapresiasi. Dia menyambut baik Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait pendekatan baru yang diambil Kejaksanaan dalam menangani korupsi.

Di mana, Kejaksanaan memperlakukan korupsi dengan lebih cermat, dengan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana kumulatif.

Kemudian, menerapkan unsur perekonomian negara dalam menghitung hukuman pelaku, serta menjerat korupsi menjadi pelaku tindak pidana sebagai upaya untuk

mengakumulasi pengembalian kerugian negara.

"Ini terobosan baru, karena selama ini hanya menghitung kerugian keuangan negara yang dihitung saat ini," ujar Hibnu.

Selama ini, perhitungan kerugian negara hanya terbatas pada kerugian keuangan yang terjadi saat ini. Namun, dengan inovasi baru ini, Kejaksanaan memperhitungkan juga kerugian ekonomi yang dapat terjadi di masa depan, seperti kerusakan lingkungan atau infrastruktur.

Misalnya, jika tanah mengalami kerusakan, negara harus mengeluarkan biaya besar untuk memulihkannya. Potensi kerusakan hutan juga menjadi pertimbangan penting dalam perhitungan ini.

"Potensi kerusakan hutan juga ke depannya akan seperti apa. Potensi ekonomi yang rusak itu ke depan seperti apa? Ini yang dikembangkan Kejaksanaan," katanya.

Langkah tersebut diambil untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara dan mencegah kerugian serupa terjadi di masa depan. Penting untuk dicatat bahwa inisiatif ini tidak melanggar hukum, karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sudah mengatur tentang kerugian keuangan dan ekonomi

negara.

"Selama ini yang dihitung hanya kerugian keuangan negara," ucapnya.

Sayangnya, terobosan baru yang dilakukan Kejagung ini belum diikuti oleh lembaga penegak hukum lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ini memang terobosan, yang memerlukan persamaan persepsi dari para penegak hukum lainnya," ujarnya.

Diperlukan keselarasan dan pemahaman yang sama dari semua pihak terkait untuk mengimplementasikan langkah ini secara efektif.

Contohnya, dalam kasus Duta Palma, Mahkamah Agung menolak untuk memperhitungkan kerugian ekonomi negara. Ini menunjukkan bahwa masih ada perbedaan pendapat dan interpretasi dalam penghitungan kerugian negara.

Konsistensi dan kerjasama antar lembaga penegak hukum sangat penting untuk memastikan bahwa upaya pengembalian kerugian negara fokus pada menghukum pelaku korupsi, tetapi juga pada pemulihan kerugian yang dialami oleh negara dan masyarakat akibat korupsi.

"MA memutus hanya kerugian keuangan negara yang riil saja," katanya. ● **mar**

Tersangka Korupsi, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp4,7 Miliar

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor sebagai tersangka kasus pemotongan insentif pegawai di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.

Merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang ia laporkan pada 6 Maret 2023, Gus Muhdlor tercatat memiliki kekayaan Rp4.775.589.664 (Rp4,7 miliar).

Harta kekayaannya terdiri dari dua bidang tanah dan bangunan yang semuanya berada di Sidoarjo dengan total nilai Rp1.735.500.000 (Rp1,7 miliar).

Kemudian, alat transportasi dan mesin yang terdiri dari mobil Honda Jazz dan motor Honda Beat yang nilainya Rp183,5 juta.

Selanjutnya, harta bergerak lainnya dengan nominal Rp3.680.000.000 (Rp3,6 miliar), surat berharga Rp900 juta, serta kas dan setara kas Rp1.646.717.180 (Rp1,6 miliar).

Dalam laporan tersebut, tercatat juga Gus Muhdlor memiliki hutang Rp3.370.127.516 (Rp3,3 miliar). Dengan demikian, jumlah total kekayaannya berada di angka Rp4.775.589.664 (Rp4,7 miliar).

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor sebagai tersangka dalam dugaan kasus pemotongan insentif pegawai di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD), Kabupaten Sidoarjo.

"Tim Penyidik kemudian menemukan peran dan keterlibatan pihak lain yang turut serta dalam terjadinya dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo," kata Kelala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (16/4/2024).

"Kami mengkonfirmasi atas pertanyaan media bahwa betul yang bersangkutan menjabat bupati di Kabupaten Sidoarjo periode 2021 s.d sekarang," katanya. ● **han**

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Pasca-Iran Serang Israel

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat terbatas (ratas) internal di Istana Kepresidenan, Jakarta, membahas dampak geopolitik usai serangan drone Iran terhadap Israel pada akhir pekan lalu.

Ratas yang digelar pada Selasa (16/4), merupakan yang pertama kali dilakukan usai titik bersama Idul Fitri 1445 Hijriah.

Menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, ratas internal membahas sejumlah hal soal situasi di Timur Tengah.

"Kita dalam rapat tadi ada beberapa hal yang dibahas, terkait dengan masalah geopolitik. Pertama, kita khawatir melihat perkembangan situasi di Timur Tengah. Dan kita yakin bahwa eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapa pun," ujar Retno usia ratas kepada wartawan.

"Oleh karena itu, upaya diplomatik perlu dilakukan oleh semua pihak, termasuk oleh Indonesia. Di dalam kaitan ini, saya melakukan komunikasi baik melalui telepon,

exchanges of messages, dan sebagainya dengan Menlu Iran, dengan Menlu Saudi Arabia, Yordania, Mesir, Uni Emirat Arab, Uni Eropa, Jerman, Belanda, dan juga dengan Wakil Menlu Amerika Serikat (AS)," jelasnya.

Presiden Jokowi memberikan arahan khusus kepada jajarannya terkait ketegangan yang terjadi antara Iran dan Israel.

Jokowi meminta agar terus dilakukan upaya diplomasi agar pihak-pihak terkait bisa sama-sama menahan diri untuk menghindari eskalasi yang lebih besar. Jokowi mengingatkan, eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapa pun.

"Masing-masing pihak sudah mulai menghitung jika terjadi eskalasi maka dampaknya seperti apa terhadap masing-masing negara. Baik harga minyak, harga kebutuhan yang lain, maupun nilai tukar dollar dan sebagainya," kata Retno.

Retno menyebut bahwa warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah Timur Tengah dalam kondisi aman. Pemerintah Indonesia terus melakukan pemantauan setiap harinya.

Rapat terbatas pada Selasa juga dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif. ● **mei**

Kejagung memperhitungkan kerugian ekonomi saat ini dan di masa depan, seperti kerusakan lingkungan atau infrastruktur, dalam kasus korupsi.

JAKARTA (IM) - Kejaksanaan Agung (Kejagung) membuat terobosan baru dalam mengear pengembalian kerugian negara yang dikorupsi. Terobosan baru itu merupakan langkah yang sangat berarti karena masih banyak lembaga penegak hukum lain yang belum menerapkan kerugian

perekonomian negara dalam kasus korupsi.

Demikian diungkapkan Pakar pidana Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (16/4).

Menurut Hibnu, langkah ini merupakan terobosan

baru yang patut diapresiasi. Dia menyambut baik Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait pendekatan baru yang diambil Kejaksanaan dalam menangani korupsi.

Di mana, Kejaksanaan memperlakukan korupsi dengan lebih cermat, dengan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana kumulatif.

Kemudian, menerapkan unsur perekonomian negara dalam menghitung hukuman pelaku, serta menjerat korupsi menjadi pelaku tindak pidana sebagai upaya untuk

mengakumulasi pengembalian kerugian negara.

"Ini terobosan baru, karena selama ini hanya menghitung kerugian keuangan negara yang dihitung saat ini," ujar Hibnu.

Selama ini, perhitungan kerugian negara hanya terbatas pada kerugian keuangan yang terjadi saat ini. Namun, dengan inovasi baru ini, Kejaksanaan memperhitungkan juga kerugian ekonomi yang dapat terjadi di masa depan, seperti kerusakan lingkungan atau infrastruktur.

Misalnya, jika tanah mengalami kerusakan, negara harus mengeluarkan biaya besar untuk memulihkannya. Potensi kerusakan hutan juga menjadi pertimbangan penting dalam perhitungan ini.

"Potensi kerusakan hutan juga ke depannya akan seperti apa. Potensi ekonomi yang rusak itu ke depan seperti apa? Ini yang dikembangkan Kejaksanaan," katanya.

Langkah tersebut diambil untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara dan mencegah kerugian serupa terjadi di masa depan. Penting untuk dicatat bahwa inisiatif ini tidak melanggar hukum, karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sudah mengatur tentang kerugian keuangan dan ekonomi

negara.

"Selama ini yang dihitung hanya kerugian keuangan negara," ucapnya.

Sayangnya, terobosan baru yang dilakukan Kejagung ini belum diikuti oleh lembaga penegak hukum lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ini memang terobosan, yang memerlukan persamaan persepsi dari para penegak hukum lainnya," ujarnya.

Diperlukan keselarasan dan pemahaman yang sama dari semua pihak terkait untuk mengimplementasikan langkah ini secara efektif.

Contohnya, dalam kasus Duta Palma, Mahkamah Agung menolak untuk memperhitungkan kerugian ekonomi negara. Ini menunjukkan bahwa masih ada perbedaan pendapat dan interpretasi dalam penghitungan kerugian negara.

Konsistensi dan kerjasama antar lembaga penegak hukum sangat penting untuk memastikan bahwa upaya pengembalian kerugian negara fokus pada menghukum pelaku korupsi, tetapi juga pada pemulihan kerugian yang dialami oleh negara dan masyarakat akibat korupsi.

"MA memutus hanya kerugian keuangan negara yang riil saja," katanya. ● **mar**

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Anggap 4 Menteri Tak Jawab Politisasi Bansos

JAKARTA (IM) - Tim Hukum Ganjar-Mahfud telah mengangap empat Menteri Kabinet Indonesia Maju yang dihadirkan ke MK tidak menjawab persoalan terkait politisasi bantuan sosial (Bansos).

Demikian salah satu kesimpulan Tim Hukum Ganjar - Mahfud sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

"Memang ada empat menteri yg dihadirkan ya oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, empat menteri ini tidak menjawab politisasi bansos. Empat menteri ini hanya menjawab bahwa bansos itu ada dasar hukumnya, ada undang-undangnya, disetujui oleh DPR dan pemerintah, that's fine, bansos itu ada dalam APBN," kata Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, Selasa (16/4).

Todung mengangap kehadiran keempat Menteri itu tidak menjelaskan terkait persoalan apa yang terjadi di lapangan. Misalnya, adanya pemusatan bansos menjelang pencoblosan, penerima manfaat bansos yang dianggap tidak sesuai data hingga penerima manfaat yang tidak sama besarnya.

"Tentu saya tidak mengatakan tidak sama, tapi banyak yang tidak berhak sebagai penerima manfaat bansos atau katakanlah kenapa Presiden Jokowi melakukan kunjungan 34 kali ke lumbung-lumbung suara di mana Ganjar-Mahfud memiliki basis pendukung yang sangat kuat? Politisasi bansos ini salah satu yang sangat spesifik yang bisa kita sebutkan," jelasnya.

Todung juga menyinggung soal masifnya kriminalisasi terhadap kepala-kepala di desa khususnya di daerah Jawa Tengah. Menurutnya kriminalisasi itu dilakukan agar kepala-kepala desa bisa menjadi vocal point untuk mempengaruhi pemilu.

"Kalau kita mendengar keterangan ahli Hamdi Muluk yang mengatakan bahwa ada pengaruh bansos terhadap perilaku memilih (voting behavior). Jadi voting behavior itu dipengaruhi antara lain oleh bansos yg mereka terima," ujarnya.

Todung juga menyinggung soal intervensi kekuasaan yang laporannya selalu bermunculan mulai dari ketidacknetralan polisi, aparat Pemerintah Desa yang melakukan intimidasi. Seluruh peristiwa-peristiwa terkait dugaan kecurangan itu pun, kata Todung, dapat dilihat kebenarannya me-

lalu laporan media massa.

"Ini seperti suasana orde baru ketika Korpri menjadi bagian dari mesin politik Golkar untuk memenangkan pemilu pada waktu itu. ASN tidak menjadi bagian dari parpol, tapi ASN bagian dari upaya membangun dinasti kekuasaan yang ada di indo. Nah yang terakhir itu mengangakat kepala-kepala daerah beberapa waktu sebelum pencoblosan," katanya.

Dalam kesempatan ini, Todung menegaskan bahwa permohonan yang dilakukan kubu Ganjar-Mahfud tidaklah sama sekali salah kamar. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi justru berwenang untuk memeriksa, mengadili apa yang dimohonkan kubunya.

"Permohonan PHPU yang kami ajukan, yang memang pada intinya mengayakan memang telah terjadi pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif. Kenapa kami memberikan angka 0 untuk perolehan paslon 02? Karena proses yang cacat itu akan melahirkan hasil yang cacat. Proses yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran, tidak menghasilkan output yang sah, legitimate, dan valid. Karena itu kami konsekuensi dengan apa yang kami rekomendasikan," katanya. ● **han**

PENGUMUMAN
Guna memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat 7 dan Pasal 127 ayat 2 dan ayat 8 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dengan ini diumumkan bahwa telah dilakukan pengalihan seluruh saham PT. GRIVA KATULISTIWA PERSADA, berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan") oleh Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana termuat dalam Sirkulasi Keputusan Para Pemegang Saham PT. GRIVA KATULISTIWA PERSADA tertanggal 16 April 2024.
Bagi pihak yang merasa keberatan atas pengalihan saham Perseroan tersebut, agar memberitahukan keberatannya secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan atau kepada Kantor PT. GRIVA KATULISTIWA PERSADA dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini.
Apabila setelah lewat jangka waktu tersebut di atas, maka bukan lagi menjadi tanggung jawab Perseroan.
Jakarta, 17 April 2024.
Direksi
PT. GRIVA KATULISTIWA PERSADA



KPK TETAPKAN BUPATI SIDOARJO SEBAGAI TERSANGKA KASUS KORUPSI
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menemui wartawan di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Jatim, Selasa (16/4). KPK menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemotongan insentif pegawai pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kab. Sidoarjo.

Pasca-serangan Drone Iran ke Israel, Kemenlu Terbitkan Travel Advice

JAKARTA (IM) - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menegaskan, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terus memantau kondisi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Timur Tengah. Terutama, WNI yang saat ini berada di Iran dan Israel maupun negara disekitarnya.

Hal itu dilakukan sebagai upaya antisipasi keselamatan WNI setelah terjadinya serangan drone Iran terhadap Israel pada akhir pekan lalu.

"WNI sejauh ini alhamdulillah dalam keadaan baik. Dalam artian tidak terdampak situasi yang ada. Kita terus melakukan pantauan dari dekat," ujar Retno Marsudi, kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (16/4).

Jajaran Kemenlu hampir setiap hari mengadakan rapat secara virtual dengan KBRI, KBRI di wilayah-wilayah yang saat ini terjadi eskalasi. Termasuk contingency plan sudah kita buat. "Insy Allah mudah-mudahan WNI kita dalam keadaan sehat," kata Retno.

Sebagai informasi, Kemenlu telah menerbitkan travel advice pada 13 April 2024. Kemudian, pihak Kemenlu pun sudah menandatangani hotline sejumlah KBRI di media sosial. Dengan begitu, WNI di Iran-Israel atau negara sekitarnya dapat langsung menghubungi hotline yang ada jika terjadi sesuatu

dengan mereka.

"Dan kita juga sudah melakukan engagement langsung dengan WNI yang berada di Iran dan juga di Israel pada tanggal 14 April untuk memberikan hal-hal apa yang mereka dapat dilakukan jika terjadi sesuatu atau jika eskalasi terus meningkat," ujar Retno.

Seperti diketahui, ratusan drone dan rudal diluncurkan Iran untuk menyerang wilayah Israel pada Sabtu (13/4) malam waktu setempat. Serangan drone dan rudal tersebut merupakan serangan yang belum pernah terjadi dalam konflik berkepanjangan di Timur Tengah, sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023.

Serangan Iran terhadap Israel merupakan serangan balasan atas aksi penyerangan terhadap konsulat Iran di Damaskus pada Senin (1/4) sekitar pukul 17.00 waktu setempat. Saat itu, pesawat tempur Israel menyorot gedung Konsulat Iran yang berada di Distrik Mezzeh barat, Damaskus, dari arah Dataran Tinggi Golan.

Misil Israel itu menghancurkan gedung dan menewaskan seorang jenderal penting di Garda Revolusi Iran (IRGC) Jenderal Mohammad Reza Zahedi dan beberapa perwira lainnya, seperti dikutip dari Telegraph. Akibat serangan itu, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei bersumpah akan membalas aksi tersebut. ● **mei**